

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Judul

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang diangkat ialah **“Perancangan Pusat Pemerintahan Kota Purwokerto”**. Judul tersebut memiliki pengertian sebuah perancangan pembangunan kawasan pusat pemerintahan baru yang berisi kantor-kantor pemerintahan di Purwokerto. Kawasan tersebut dimaksudkan agar kantor-kantor pemerintahan di Purwokerto menjadi satu atau terpusat dalam satu area, dalam kawasan ini akan lebih ditonjolkan gedung kantor Bupati dan kantor DPRD sedangkan kantor-kantor dinas pemerintahan yang lain akan ditempatkan pada gedung lain disekitar gedung kantor Bupati dan kantor DPRD.

1.2 Latar Belakang

Purwokerto adalah sebuah kota yang tidak otonom karena masih menjadi bagian dan sekaligus menjadi ibukota dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kota Purwokerto juga merupakan kota terbesar yang ada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Sebenarnya kota ini pernah berkembang pesat pada era 1960-1980. Tapi karena kondisi sosial, politik dan ekonomi, selama kurang lebih 20 tahun kota ini stagnan. Sampai dengan tahun 2000-an Purwokerto mulai berkembang pesat, dengan munculnya beberapa fasilitas yang di dalam kota antara lain pusat perbelanjaan, pusat pertokoan, restoran/ pusat kuliner, sarana olah raga, perguruan tinggi, hotel berbintang bekelas internasional, pusat layanan kesehatan, instansi pemerintah (Banyumas Corner, 2015) hingga transportasi umum Trans Jateng yang baru diresmikan Agustus 2018 ini.

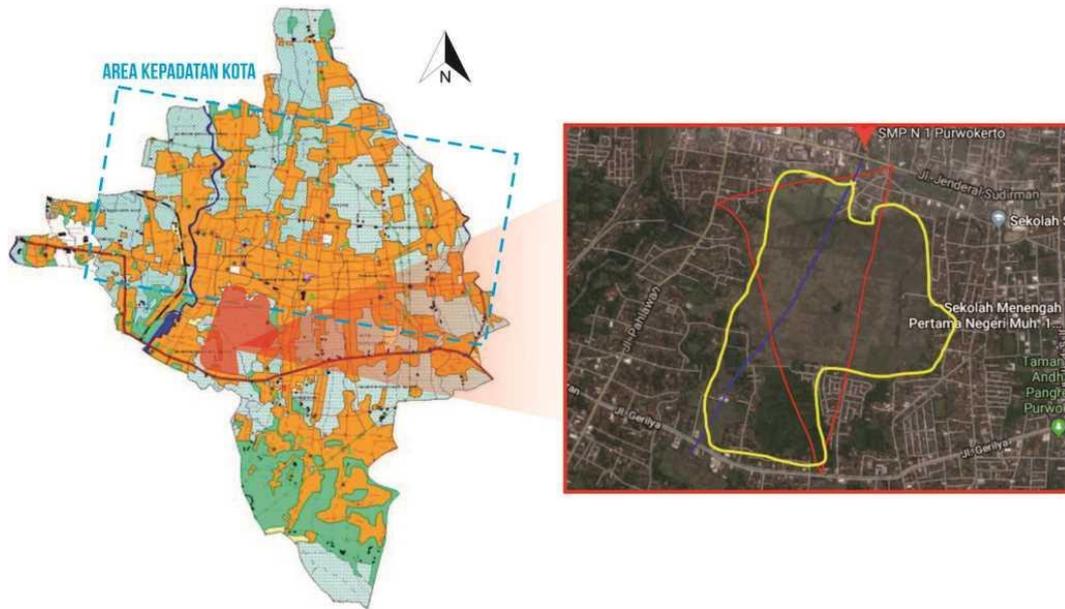
Dengan adanya perkembangan kota tersebut memberi akibat semakin memadatnya lalu lintas dan pertumbuhan penduduk di Purwokerto terutama di pusat kota. Untuk menyikapi pekermbangan kota yang sangat pesat tersebut, pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah mulai mengkaji pemekaran

wilayah Kota Purwokerto yang sebelumnya hanya 4 kecamatan nantinya akan menjadi 11 kecamatan yang terdiri dari 27 kelurahan dan 20 desa. Mulai pada tahun 2015 Pemerintah mulai mempersiapkan pemekaran wilayah karena sudah diamanatkan di Perda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2005-2025 bahwa pemekaran wilayah harus dilaksanakan pada periode 2014-2019. Menurut Pemerintah dengan adanya pemekaran tersebut Kabupaten Banyumas akan terbagi menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Banyumas dan Kota Madya Purwokerto yang masing-masing akan berdiri sendiri (Widiyatno, 2015).

Dalam mendukung perkembangan daerah yang semakin pesat, direncanakan akan dibangun sebuah kota baru di daerah Tanjung, Purwokerto Selatan. Daerah tersebut dinilai cocok dengan alasan wilayah tersebut masih memiliki lahan yang luas dan sebagai salah satu antisipasi penyelamatan lahan resapan air di daerah utara. Rencana tersebut diawali dengan pembukaan jalan penghubung dari Jalan Gerilya ke Jalan Jenderal Sudirman untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kedua jalan tersebut. Mega proyek tersebut di mulai dengan pembebasan lahan seluas 50 hektar pada tahun 2014. Lahan ini diproyeksikan akan menjadi sebuah kota baru sebagai *landmark* Purwokerto yang berisi CBD (*Central Business District*) dan kantor pelayanan pemerintahan baru khususnya kantor DPRD (Banyumasnews.com, 2015).

Namun pada Agustus 2016 Ketua Pansus RDTRK Purwokerto, Subagyo menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan CBD tersebut terpaksa dibatalkan, disebutkan batalnya pembangunan tersebut didasarkan pada pertimbangan alokasi RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik kawasan perkotaan yang masih kurang. Sehingga kawasan yang rencananya diplot sebagai CBD akan tetap dipertahankan sebagai zona hijau (Radar Banyumas, 2016). Akan tetapi dengan adanya pembangunan jalan penghubung antara Jalan Gerilya dan Jalan Sudirman dipastikan akan tetap tumbuh secara alami menjadi kota baru. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas bahwa direncanakan di sepanjang jalan penghubung tersebut akan dibangun perkantoran dan masjid,

namun akan lebih banyak RTH karena lokasi merupakan bekas persawahan. (Ely, 2018).



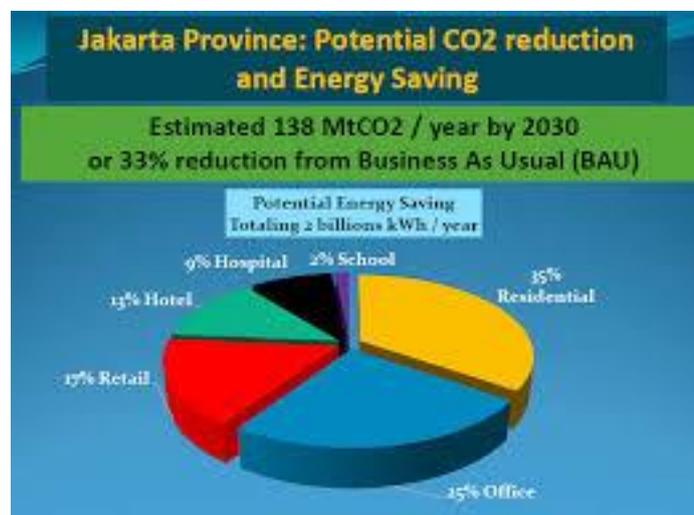
Gambar 1 Calon Lahan Kota Baru Purwokerto
(sumber : Data Penulis, 2018)

Dengan adanya rencana-rencana tersebut maka diperlukan sebuah perencanaan Pusat Pemerintahan Kota Purwokerto agar lebih tertata dan terpusat sekaligus dapat menjadi suatu pusat kegiatan sosial maupun ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas kota yang nantinya akan memiliki otonomi daerah sendiri.

Penelitian ini dimaksudkan untuk merancang sebuah kawasan pusat pemerintahan yang terpusat agar menjadikan kegiatan pemerintahan lebih efisien dan efektif. Pusat pemerintahan tersebut akan dibangun pada kawasan yang direncanakan akan menjadi sebuah *landmark* baru Purwokerto. Menurut Kevin Lynch *landmark* merupakan citra suatu kota dimana memberikan suatu kesan terhadap kota tersebut. *Landmark* merupakan elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang menonjol dari kota, seperti gunung atau bukit, gedung tinggi, menara, tanda tinggi, tempat ibadah dan sebagainya. *Landmark* mempunyai identitas yang lebih baik jika bentuknya jelas dan unik (ikonik/khas) dalam lingkungannya, dan ada sekuens dari beberapa landmark (merasa nyaman dalam orientasi), serta ada perbedaan skala masing-masing (Zahnd, 2006). Dengan

adanya teori tersebut maka kawasan pusat pemerintahan tersebut sebaiknya memiliki suatu ciri khas pada unsur arsitekturalnya yang dapat menonjolkan identitas kota.

Di Indonesia, gedung perkantoran termasuk pengguna energi dalam sektor komersial merupakan pemakai energi listrik yang potensial karena mewadahi berbagai kegiatan yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar. Sebagian besar energi listrik yang dikonsumsi oleh gedung perkantoran digunakan untuk sistem penghawaan buatan sebesar 50-70%, dan pencahayaan sebesar 10-25%. (Jamala, 2015). Namun saat ini bangunan dengan konsep hemat energi dan ramah lingkungan menjadi tren yang mulai dan akan terus berkembang. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat terus meningkat terhadap isu pemanasan global dan krisis energi. Menurut *Regulation for Green Growth : Jakarta Province Green Building Code (2010)* potensi efisiensi energi untuk gedung perkantoran cukup besar dibandingkan fungsi lainnya yaitu sebesar 25%. Oleh karena itu, perancangan kantor hemat energi dapat menurunkan cukup banyak penggunaan energi secara efektif.



Gambar 2 Potential Energy Saving
(sumber : Fitriana, 2013)

Atas dasar pemikiran tersebut, akan dirancang sebuah kantor pusat pemerintahan yang meliputi Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Kantor Dinas yang terpusat agar kegiatan pemerintahan lebih efektif dan efisien juga akan

menjadi salah satu *landmark* baru di Purwokerto yang akan dirancang dengan konsep *eco architecture*, konsep tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada calon lahan Pusat Pemerintahan Purwokerto yang merupakan bekas persawahan, dan juga dapat menjadi pelopor bangunan ramah lingkungan di Purwokerto.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana rancangan kantor pemerintahan Kota Purwokerto menjadi salah satu *landmark* baru Purwokerto menggunakan konsep *eco architecture*.

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari **“Perancangan Pusat Pemerintahan Kota Purwokerto”** yaitu :

1. Merancang kantor pemerintahan Kota Purwokerto sekaligus menjadi salah satu *landmark* baru Purwokerto.
2. Merancang kantor pemerintahan menggunakan konsep *eco architecture*.

1.4.2 Sasaran

Sasaran dari **“Perancangan Pusat Pemerintahan Baru Kota Purwokerto”** yaitu :

1. Konsep perencanaan dan rancangan untuk mewujudkan Pusat Pemerintahan Kota Purwokerto yang baru.
2. Konsep perencanaan dan perancangan untuk mewujudkan pusat pemerintahan yang ikonik sebagai bagian dari *landmark* Kota Purwokerto menggunakan konsep *eco architecture*.

1.4 Lingkup Pembahasan

Dasar Program Perencanaan dan Perancangan yang disusun dalam laporan ini perlu batasan pembahasan sebagai berikut :

1. Pembahasan mengacu pada sasaran berupa analisis yang menghasilkan konsep penyelesaian.

2. Pembahasan perancangan dan perencanaan berpedoman pada studi literatur dengan membandingkan studi sejenis yang sudah ada.
3. Pembahasan dibatasi pada permasalahan di bidang arsitektur, permasalahan lain yang tidak terkait dengan proses perencanaan dan perancangan arsitektur akan dibahas secara asumsi, logika dan mengacu pada hasil studi pihak lain yang terkait dengan pusat pemerintahan atau kantor pemerintahan.

1.5 Metode Pembahasan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu kegiatan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang objek studi melalui analisis secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh baik data primer maupun sekunder.

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data

1. Data Primer

Merupakan data eksisting atau informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi. Data primer yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peta Tata Ruang Wilayah Purwokerto
- b. Data bangunan Kantor Instansi Pemerintahan Kota Purwokerto

Data pendukung diatas dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a) Observasi

Pengamatan secara langsung ke kantor-kantor pemerintahan di Purwokerto guna mendapatkan dukungan data. Hal ini dilakukan agar mengetahui keadaan objek secara langsung, mendalam dan sistematis. Memiliki tujuan untuk menggambarkan dan melihat sesuatu objek yang diteliti secara fakta.

b) Wawancara

Dilakukan dengan cara tatap muka dan memberikan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini yang bersangkutan seperti pegawai-pegawai kantor pemerintahan.

2. Data Sekunder

Beberapa teori yang menunjang dalam menyelesaikan permasalahan penelitian, bisa berupa dari jurnal, buku, maupun peraturan daerah yang menunjang pada perencanaan dan perancangan.

1.6.2 Tahap Analisa Data

Merupakan pengolahan tahap perolehan dari data primer dan data sekunder, menggunakan metode analisa dan sintesa, kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan dan persoalan yang ada, kemudian disintesa sebagai bahan dalam penyusunan konsep perencanaan dan perancangannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penyusunan laporan dasar program perencanaan dan perancangan arsitektur (DP3A) meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian pengertian judul, latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka dan studi-studi terkait mengenai substansi materi kajian objek, studi kasus, elemen perancangan guna mendukung penyusunan laporan.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN

Berisi tentang gambaran umum lokasi dan data fisik lokasi perencanaan, gagasan perancangan dan analisa site eksisting

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berisi tentang analisa dan konsep kawasan, analisa dan konsep ruang, analisa dan konsep arsitektur, analisa dan konsep struktur dan utilitas